

KAJIAN TEMA

Kepemimpinan dalam Bingkai Multikulturalisme

Yesaya Sandang

Abstract

A leader in a multicultural society plays a very important role, especially in Indonesian context that already well known for their multicultural society. This article discuss about the ethical principles in the multicultural society and how it related with leadership quality. The aim of this discussion is to show the quality that could work as foundation for every leader in multicultural context. Ultimately this article suggests three qualities; openness and sense of acceptance, communicative, and ethical awerness for justice and solidarity.

Keywords: *Leadership, Multiculturalism, Ethics, Principles*

Pendahuluan

Salah seorang pemimpin bangsa yang memiliki telah terbukti komitmennya terhadap persoalan multikulturalisme adalah (alm) KH Abdurahman Wahid (Gus Dur). Salah satu kebijakannya untuk memberikan pengakuan terhadap kebudayaan Tionghoa di Indonesia mencerminkan hal tersebut. Dalam kaitannya dengan hal itu menarik untuk menyimak tulisan Wildan Pramudya (2010) sesaat setelah Gus Dur wafat. Tulisan itu berjudul *"Gus Dur Sebagai Orang Asing"*.

Dalam analisis yang disajikan oleh Pramudya dapat ditemui penjelasan mengapa Gus Dur dapat dikatakan sebagai salah seorang pemimpin dengan wawasan multikultur yang tinggi. Meminjam gagasan sosiolog Georg Simmel Pramudya menjelaskan bahwa Gus Dur mampu menempatkan dirinya dalam suatu 'relasi interseksi yang dibangun atas dasar kedekatan dan keberjarakan' (Pramudya, 2010:6).

Lebih lanjut Pramudya menyatakan bahwa dalam relasi interseksi, orang asing menjadi bagian dari komunitas tetapi tidak sepenuhnya menjadi bagian dari komunitas tersebut karena ia tetap mampu mengambil jarak dengannya. Orang asing adalah orang yang berada di dalam sekaligus di luar komunitas. Gus Dur tepat disebut sebagai orang asing karena selama ini ia mengembangkan relasi interseksi tersebut tidak saja di dalam komunitas NU tetapi juga dengan kekuasaan dan berbagai

komunitas lain yang lebih luas (Pramudya, 2010).

Penempatan diri semacam orang asing inilah yang memungkinkan Gus Dur untuk tetap memiliki pandangan yang cukup arif dalam perspektif kebhinekaan manakala ia harus memutuskan suatu perkara dan mengangkat suara dari kelompok (budaya) yang terpinggirkan. Dengan kata lain, Gus Dur bukan monopoli suatu kultur tertentu, melainkan secara fleksibel mampu menempatkan dirinya dalam berbagai latar kultural. Namun demikian Gus Dur tetap dapat memastikan bahwa dirinya tidak kehilangan identitas bawaannya walau menjadi 'asing' dan dengan demikian ia tetap dapat memahami sudut pandang identitas di luar dirinya ketika harus memimpin dan mengelola berbagai macam pihak dan kepentingan dari beragam latar belakang.

Cerita Gus Dur itu tentunya bukan satu-satunya cerita mengenai pemimpin di Indonesia yang memiliki watak kebhinekaan dan wawasan kebudayaan yang tinggi. Cerita tersebut dijadikan contoh kecil untuk menegaskan bahwa dalam konteks Indonesia yang demikian majemuk diperlukan sosok pemimpin yang dapat dijadikan rujukan perihal bagaimana mengelola berbagai urusan di bangsa ini ketika kenyataan kemajemukan tidak terelakan.

Seputar Multikulturalisme

Banyak negara saat ini yang secara budaya amat beragam. Menurut perkiraan terakhir, 184 negara merdeka di dunia ini terdiri dari 600 kelompok bahasa hidup dan 5000 kelompok etnis. Hanya di beberapa negara dapat dikatakan bahwa warganya memiliki bahasa yang sama atau termasuk dalam kelompok etnonasional yang serupa (Kymlicka, 2002:1). Sebagaimana diungkapkan oleh Kymlicka (2002:13), masyarakat modern dewasa ini semakin sering diperhadapkan pada berbagai macam kelompok yang menuntut pengakuan atas identitasnya, dan diterimanya perbedaan kulturalnya masing-masing. Hal ini biasa disebut sebagai tantangan multikulturalisme.

Istilah multikulturalisme sendiri sebenarnya mencakup berbagai bentuk pluralisme budaya yang berbeda, masing-masing memiliki tantangannya sendiri-sendiri (Kymlicka, 2002:13). Keterangan ini sebenarnya hendak menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan multikultur merupakan salah satu bentuk dari pada pluralisme, dalam hal ini pluralisme kultural. Dengan demikian menerima ke-multikultural-an juga berarti menerima ke-plural-an.

Namun dalam perkembangannya pemahaman terhadap

multikulturalisme sering disalahkaprahkan. Paling tidak terdapat dua pemahan ekstrim tentangnya. Pertama, multikulturalisme sering diasosiasikan dengan pemujaan atas perbedaan, yang mengarah kepada gagasan esensialis bahwa setiap identitas budaya memiliki suatu otentisitas dan mereka yang bukan bagian dari identitas ini adalah “orang luar” yang tidak memiliki hak bicara. Kedua, pada ekstrem lainnya multikulturalisme dijadikan kebijakan Negara yang berpretensi memberikan pengakuan terhadap kelompok minoritas. Namun bahayanya karena pengakuan tersebut “diberikan” maka terdapat kemungkinan untuk dicabut kembali (Budiman, 2007:105).

Kesalahkaprahan tersebut berujung pada kritik terhadap multikulturalisme dari beberapa dasar: 1. Teknik manajerial yang dipakai pemerintah, atau pemegang kekuasaan, untuk memperdalam kohesi sosial dengan mengorbankan komunitas minoritas. 2. Asumsi-asumsi bahwa subyek bersifat statis dan “sudah dari sananya”, yang umumnya didefinisikan secara kultural, linguistik, atau perbedaan etik. 3. Komodifikasi perbedaan yang hanya sekedar properti, dan bukan proses-proses dan praktek-prakteknya. 4. Penguatan gagasan atau kesan bahwa seseorang yang berkuasa secara uniter, yang membatasi orang lain boleh mendapat toleransi (Adhanta, 2007:121). Oleh karenanya multikulturalisme tidak dapat dipisahkan dari pluralisme (kultural). Pluralisme sebagai konsep induk memaknai diversitas dengan lebih baik dibanding multikulturalisme yang cenderung menganggap komunitas kultur tertentu bersifat homogen dan melokalisirnya.

Multikulturalisme dan Pluralisme

Pluralisme atau kemajemukan merupakan sebuah fakta yang tak terelakan dalam kehidupan manusia. Berdasarkan fakta ini, persoalan mengenai tercapainya suatu masyarakat yang beradab dalam kewargaan yang inklusif (terbuka) merupakan sebuah problem universal. Bagi Indonesia misalnya, persoalan kemajemukan kultural ini merupakan suatu fakta konkrit yang terbentang dari Sabang hingga Merauke dan sejak lama seluruh komponen bangsa selalu diingatkan agar hidup berdampingan dengan damai dalam masyarakat yang berbeda suku bangsa, agama, ras dan golongan. *Bhinneka Tunggal Ika* jelas merupakan bentuk pengakuan idealitas multikultur di Indonesia.

Masyarakat Indonesia kerap diajak serta dihimbau untuk mengerti, menghayati, dan melaksanakan kehidupan bersama ke arah terciptanya persatuan dan kesatuan dalam perbedaan, sebagaimana termaktub dalam

semboyan Bhineka Tunggal Ika itu. Dengan demikian dalam semboyan itu warga Indonesia selalu diingatkan untuk menghargai dan menghayati perbedaan suku bangsa, agama, ras dan golongan sebagai unsur utama untuk memepersatukan dan bukan dijadikan alasan bagi terjadinya konflik sosial maupun vertikal. Itulah mengapa dalam sosiologi, ajakan agar selalu hidup berdampingan secara damai merupakan bentuk sosialisasi nilai yang terkandung dalam multikulturalisme dan pluralisme (Liliweri, 2005).

Dari sini dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa multikulturalisme merupakan pluralisme budaya. Dengan kata lain pengakuan akan kepluralan merupakan gugus gagasan penting bagi multikulturalisme. Lebih jauh, multikulturalisme merupakan perangkat gagasan yang memperjuangkan "*politics of recognition*", yakni, bentuk pengakuan terhadap setiap entitas kultural yang ada, khususnya yang terpinggirkan dan tidak berdaya (Gerung, 2008).

Namun perlu diperhatikan pula dalam kondisi sistem negara hukum yang rapuh serta keterpurukan ekonomis, politik multikulturalisme mudah berkembang menjadi politik aliran yang dengan penuh kebencian meradikalkan dan mendramatisir segala perbedaan kecil, sehingga orang kehilangan perspektif menyeluruh. Apalagi jika politik multikulturalisme tersebut dilepaskan dari gugus gagasan pentingnya, yakni pluralisme.

Pendasaran Etis

Sampai pada titik ini muncul problem lain, yakni pijakan etis dan nilai-nilai macam apa yang pantas diajukan sebagai basis bagi multikulturalisme agar ia tidak terjebak kedalam radikalisme. Berikut beberapa pokok yang dapat dijadikan rujukan refleksi:

Pertama, Penerimaan (*Acceptance*). Banyak konflik dan kekejaman di dunia ini dipupuk melalui ilusi tentang adanya sebuah identitas yang tunggal dan tanpa pilihan, dengan kata lain tidak adanya penerimaan terhadap yang lain. Prospek perdamaian dalam dunia masa kini bisa jadi terletak dalam pengakuan akan kemajemukan setiap insan dan pemahaman diri sebagai penghuni bersama dunia yang luas ini (Sen, 2006).

Oleh karena itu, langkah awal yang perlu ditempuh adalah menerima fakta bahwa dalam kehidupan ini terdapat keragaman. Menerima dan merenguh dengan sepenuhnya bahwa ada liyan (*the others*) dalam keseharian, dimana masing-masing mereka memiliki identitas yang tidak sama. Harapan akan terwujudnya harmoni amat bergantung pada

pemahaman yang lebih jernih terhadap kemajemukan identitas manusia, dan pada sikap menerima bahwa identitas-identitas tersebut dapat saling bersinggungan satu sama lain (Sen, 2006).

Kedua, Nalar Komunikatif. Dalam suatu masyarakat plural dan multikultur, komunikasi memainkan peranan yang penting. Komunikasi merupakan jembatan yang menghubungkan berbagai perbedaan yang ada, komunikasi yang bersifat dialogis (dua arah) dan bukan monologis (satu arah). Dalam komunikasi, bukannya masing-masing pihak/partisipan memakai pihak lain untuk mencapai tujuan mereka masing-masing, melainkan masing-masing pihak mengkoordinasikan rencana tindakan mereka. Artinya, masing-masing pihak mengambil alih peran pihak yang lainnya (Suseno, 2000:220).

Suatu komunikasi itu rasional apabila saling pengertian tercapai. Itulah Nalar/Rasionalitas Komunikatif. Demi tercapai saling pengertian diperlukan paling tidak empat unsur dalam suatu komunikasi. Pertama, *kejelasan* : aku mengungkapkan diri dengan jelas sehingga apa yang mau dikatakan dapat dimengerti. Kedua, *kebenaran*: aku mau menyampaikan sesuatu. Ketiga, *kejujuran*: aku mau mengungkapkan diriku. Keempat, *ketepatan*: omonganku harus cocok dengan norma-norma komunikasi, setiap pihak harus mau mencapai saling pengertian. Komunikasi yang berhasil mengandaikan keempat unsur tersebut dan itu semua tidak dapat dipaksakan ataupun direayasa (Habermas, 1971 dalam Suseno, 2000:221).

Ketiga, Keadilan dan Solidaritas. Masyarakat yang pluralistik hanya dapat ditata secara etis apabila keadilan dinomorsatukan terhadap pandangan-pandangan tentang tujuan hidup manusia. Prinsip-prinsip keadilan harus netral terhadap keyakinan-keyakinan tentang hidup yang baik dalam arti bahwa (a). orang/kelompok orang tidak ada yang didiskriminasikan hanya karena kekhasan keyakinan dan cita-cita moral dan religiusnya; dan (b). bahwa prinsip-prinsip itu oleh seluruh masyarakat dapat diterima sebagai adil, jadi tidak hanya berdasarkan pandangan komunitas tertentu tentang apa yang baik (Suseno 2005:216). Disini keadilan menjadi tanda solidaritas dan hormat anggota masyarakat satu dengan yang lain. Solidaritas diciptakan dengan meningkatkan kepekaan kita terhadap liyan (*the others*). Kepekaan yang lebih tinggi berarti menjadi lebih sulit bagi kita untuk mendiskriminasi dan memarginalkan orang-orang yang berpikir berbeda dari kita (Rorty, 1989 dalam Suseno, 2000:253).

Problematika Budaya Bangsa

Demikian telah diuraikan berurut-turut sekelumit tentang multikulturalitas beserta gugus gagasan filosofis serta pijakan etisnya. Namun kini tantangan yang harus dilalui ada pada problematika budaya bangsa. Terdengar terlalu pesimis untuk mengatakan situasi kebudayaan di Indonesia kini ada pada kategori katastrofi kebudayaan. Namun, perlu dicermati beberapa gejala yang mengarah pada dugaan semacam itu dalam kompleks peristiwa yang makin menguatirkan. Kecamuk politik amok di masyarakat, pendangkalan intelegensi dalam produk-produk kebudayaan massa, mutu perdebatan akademis yang rendah, selebritisasi jabatan-jabatan publik, pudarnya toleransi sosial horisontal, dendam politik masa lalu dan berbagai rentetan paradoks kemanusiaan (Gerung, 2008). Ini semua merupakan tantangan kebudayaan yang harus dicarikan solusinya.

Kebudayaan dalam pemaknaan apapun mengarahkan kepada pembentukan karakter suatu bangsa. Dengan demikian selalu ada segi politik, kolektif dan historis di dalam kebudayaan. Di sini tepat memang kalau kita berbicara mengenai strategi kebudayaan dalam mengembangkan peradaban bangsa yang multikultur. Namun soalnya, selepas dari rezim orde baru dan memasuki era reformasi hingga saat ini kita terus menerus diperhadapkan pada strategi kebudayaan yang serba tanggung.

Pancasila yang lahir dan tumbuh dalam masyarakat plural dan semangat pluralisme justru kemudian menjadi salah satu “kebudayaan” yang dianggap bersaing dengan budaya-budaya lainnya. Padahal Pancasila dilahirkan dalam kondisi pluralisme dari segi kenyataan alamiah bangsa Indonesia. Disebut dari kenyataan alamiah karena memang demikian kondisi keanekaragaman masyarakat dan kebudayaan yang ada. Dan, ketika Pancasila lahir dan kemudian menjadi dasar negara, bangsa kita memiliki warna plural yang kuat (Nasution & Agustinus, 2006).

Untuk menyikapi problematika kebudayaan yang sementara menyeruak rupa-rupanya dibutuhkan pula politik kebudayaan dan pendidikan kewargaan yang berwawasan multikultur. Politik kebudayaan dibutuhkan demi menjawab kebutuhan mengenai arah dan cita-cita Indonesia sebagai suatu komunitas politik yang masih perlu dipertahankan. Apa yang mau dilakukan terhadap manusianya, cita-citanya, dan tujuan-tujuan dasarnya? Di sisi yang lain pendidikan sangat erat dengan kebudayaan, sebab menjadi manusia sebagai inti pendidikan berarti membentuk lingkungan hidupnya, yang tidak lain adalah kebudayaannya.

Kalau globalisasi memiliki kecenderungan homogenisasi budaya, yakni menyeragamkan budaya dalam kemasan yang sama. Maka multikulturalisme merupakan reaksi terhadapnya, multikulturalisme boleh jadi menekankan toleransi yang terbuka terhadap masuknya berbagai budaya asing, tetapi dari lain pihak bisa juga menandai munculnya kesadaran dan kebangkitan budaya-budaya tradisional untuk menyatakan identitas mereka (Gerung, 2005).

Kepemimpinan Berwawasan Multikultur

Sekarang beralih kepada pembahasan mengenai kepemimpinan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pemimpin dalam konteks pembahasan ini adalah pemimpin yang mampu menegakkan suatu peradaban multikultur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini pemimpin memiliki peranan krusial demi tercipta kepastian hidup bersama dalam bingkai kemajemukan. Tentunya ini bukan barang gampang walau tetap dimungkinkan. Sejarah peradaban dunia dan juga Indonesia dipenuhi oleh kisah-kisah para pemimpin yang menaruh komitmen besar terhadap kemajemukan, dimana cerita Gus Dur yang diangkat pada sebagai pembuka pembahasan ini adalah salah satunya.

Berangkat dari refleksi terhadap pijakan etis dan nilai-nilai macam apa yang dapat diajukan sebagai basis bagi multikulturalisme, berikut dielaborasi ke dalam kualitas-kualitas pemimpin berwawasan multikultur. **Pertama**, keterbukaan. Menjadi pemimpin yang berwawasan multikultur tentunya memerlukan pertama-tama sikap yang mau terbuka terhadap berbagai macam keragaman yang ada diluar dirinya. Setiap pemimpin model ini memiliki '*sense of acceptance*' yang tinggi terhadap berbagai macam latar budaya yang tidak ia miliki.

Keterbukaan juga berarti interaksi dan interseksi yang luas sehingga dengan demikian pemimpin model ini memiliki tingkat pergaulan yang luas. Interaksi yang ia miliki tidak semata-mata terbatas pada kalangan/kelompoknya. Bahkan lebih daripada itu ia juga sanggup memiliki keterlibatan yang mendalam terhadap berbagai kalangan di luar kelompoknya. Akan tetapi pada saat yang bersamaan kualitas ini di iringi dengan kemampuan untuk mengembangkan hubungan yang dekat sekaligus berjarak. Hal ini dibutuhkan untuk menjaga objektivitas karena dengan begitulah dukungan terhadap multikulturalitas menjadi berimbang dan proporsional.

Kedua, komunikatif. Pemimpin yang ingin memastikan keberlangsungan multikulturalitas dengan baik perlu mengembangkan

kemampuan berkomunikasi lintas kultur yang baik pula demi terciptanya iklim yang kondusif bagi kemajemukan. Di sini poin pentingnya adalah membangun komunikasi yang berpedoman pada nalar komunikatif sehingga tidak ada satu kelompokpun yang merasa terabaikan dan dimanipulasi. Komunikasi semacam ini mensyaratkan sang pemimpin untuk aktif melakukan pendekatan komunikasi dan menciptakan ruang-ruang dialog.

Ketiga, memiliki kesadaran etis. Setiap pemimpin yang berwawasan multikultur perlu memiliki wawasan dan mengupayakan keadilan serta solidaritas. Karena akan menjadi sia-sia keterbukaan, interaksi/interseksi dan kemampuan membangun komunikasi yang baik tanpa diakhiri dengan perwujudan nyata ke dalam keadilan dan solidaritas sosial. Kenyataan multikultur hanya dapat dipastikan keberlangsungannya jika dalam realita sosial, masing-masing kultur menikmati keadilan. Oleh karena itu, pemimpin juga perlu turut berperan untuk menciptakan terwujudnya keadilan dan solidaritas sosial. Dengan cara ini pula kohesivitas sosial sekaligus dapat dipastikan terwujud.

Penutup

Pasca pergantian kepemimpinan nasional 2014 (baca: Pilpres) lalu wajar kiranya jika diiringi dengan harapan bahwa pemimpin bangsa yang terpilih mampu memimpin bangsa ini untuk semakin dewasa dalam urusan multikulturalisme dan dapat menjawab tantangan kebudayaan yang menghadang. Seorang pemimpin yang dapat berperan aktif demi menjaga keutuhan Republik Indonesia dan juga mampu untuk menopang tegaknya peradaban yang lebih berperikemanusiaan, adil, dan beradab.

Harapan juga digantungkan agar sebagai pemimpin bangsa, komitmen dirinya terhadap multikulturalisme di Indonesia dapat dijadikan sebagai rujukan dan teladan bagi segenap komponen bangsa. Hal ini penting agar dengan demikian dapat memicu preseden-preseden baru dalam sejarah bangsa dan menghasilkan efek yang lebih luas dan permanen. Memang disadari bahwa ada beberapa persoalan bangsa lainnya yang perlu dipecahkan secepatnya, misalnya urusan ekonomi dan politik, sehingga masalah kebudayaan dan multikulturalisme bisa saja belum akan segera muncul kepermukaan (jika tidak ada kasus 'besar' yang mendesak). Untuk itu perlu tetap dipastikan bahwasannya problem kebudayaan dan multikulturalisme tetap ada dalam agenda kepemimpinan nasional.

Pada akhirnya, tema multikulturalisme adalah tema yang akan selalu menetap dalam pembicaraan suatu bangsa yang majemuk, termasuk Indonesia. Dengan demikian siapapun yang berani tampil sebagai pemimpin di bangsa ini tidak boleh gagap dalam percakapan multikultur. Lebih daripada itu, menjadi pemimpin di negeri ini sudah barang tentu mensyaratkan kualitas seorang pemimpin yang berwawasan multikultur.

Daftar Pustaka

- Adhanta, Verdi. (2007). Kata dan Makna. *Jurnal Perempuan: Merayakan Keberagaman. No.54/2007, hal 117-123*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan
- Budiman, Manneke. (2007). Wawancara dengan Manneke Budiman. *Jurnal Perempuan: Merayakan Keberagaman. No.54/2007, hal 104-108*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan
- Gerung, Rocky. 2008. Humaniora dan Arah Kebudayaan Kita. Depok: FIB-UI
- Kymlicka, Will. 2002. Kewargaan Multikultural. Diterjemahkan E.H Eddin. Jakarta: LP3ES
- Liliweri, Alo. 2005. Prasangka dan Konflik. Yogyakarta: LKiS
- Magniz-Suseno, Franz. 2000. 20 Tokoh Etika abad ke-20. Yogyakarta: Kanisius
- _____. 2005. Pijar-pijar Filsafat. Yogyakarta: Kanisius
- Nasution, Irfan & Agustinus, Ronny (penyunting). 2006. Restorasi Pancasila, Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas (Prosiding Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila, Kampus FISIP UI, Depok, 31 Mei, 2006). Bogor: Brighten Institute
- Pramudya, Wildan. 2010. Gus Dur sebagai Orang Asing. Kompas 9 Januari. hal 6
- Robet, Robertus. 2007. Republikanisme dan Keindonesiaan: Sebuah Pengantar. Serpong: Margin Kiri
- Rorty, Richard. 1989. Contingency, Irony and Solidarity. Cambridge: Cambridge University Press
- Sen, Amartya. 2006. Identity and Violence. New York: W.W. Norton